



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI..... I

DAFTAR TABEL II

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 6

 A. Maksud 4

 B. Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 26

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 30

BAB V PENUTUP..... 35

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025-2026.....	9
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 - 2026	18
Tabel 3	Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao.....	20
Tabel 4	Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026⁵ disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2025 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 dan substansi Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045:
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);
19. Rancangan Awal Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Ranwal Renja adalah sebagai pedoman:

1. Pelaksanaan pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; serta
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD;
4. Lampiran tabel rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. Tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya serta
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pemkes Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Bagian Pemkes ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bagian Pemkes Setda. Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun anggaran 2024, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bagian Pemkes. serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 3.035.001.500,- dengan realisasi sebesar Rp.3.009.334.725,- atau 99,15% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.2.375.001.500,- dengan realisasi sebesar Rp.2.350.746.125,- atau 99,98%, dan belanja modal sebesar Rp.660.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.658.588.600,- atau 99,79%. Rencana fisik secara kumulatif dari 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran tidak ada.

B. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu:

- **Program, yaitu :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

- **Kegiatan, yaitu :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Administrasi Tata Pemerintahan; dan
7. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

- **Sub Kegiatan, yaitu :**

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

4. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
10. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
11. Penataan Administrasi Pemerintahan;
12. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8/7)	10	11 =(6+8+10)	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dok	31	38	0	0	0		38	123

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja-PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA, SKPD dan Perubahan DPD PD	Dok	0	24					24	#DIV/0!
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	24	24	0	0	0		24	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	7	14	0	0	0		14	200
		Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja Per Triwulan		0	14					14	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	10	108	12	12	100		120	1200
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	10	17	12	12	100	5	34	340
		Tersedianya Honor Pengelola APBD	Org	0	108					108	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	24	28	12	12	100	12	52	217
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dok	24	24	12	12	100	12	48	200

		Daerah SKPD									
		Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD	Org/Bulan	0	28					28	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	Org	0	4					4	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	Org/ Bulan	0	4					4	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unt	4	4	1	3	300	1	8	200
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	3	3					3	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	12	12	100	2	18	450
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	0	24					24	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	Bulan/Pake t	0	2					2	-
		Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	Bulan/Pake t	0	2					2	-
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	12	12	100	2	18	450
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan	Kali	0	79					79	-

	Konsultasi SKPD	Luar Provinsi									
		Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali	0	54					54	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	114	80	50	50	100	57	187	164
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	4	1					1	25
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	4	1					1	0
		Pembangunan Kantor Camat Pantai Baru	Paket	0	1					1	-
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap	48	72	24	24	100	36	132	275
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	24	24	12	12	100	12	48	200
		Penyediaan Surat Menyurat	Lap	0	24					24	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	24	24	12	12	100	24	60	250
		Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, listrik dan air	Lap	0	24					24	-

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	46	66	17	18	105.88	26	110	239
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	18	9	9	100	9	36	180
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	0	2					2	-
		Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (1 Mobil, 8 Motor)	Unit	0	18					18	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	24	18	6	6	100	12	36	150
		Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja	Unit	0	4					4	-
	Pemeliharaan/Rehabilit as Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Unit	2	6	2	3	150	5	14	700
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	Dok	26	40	12	15	125.00	17	13	50

	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	14	14	7	9	128.57	7	7	50
		Terlaksananya Rapat Lengkap Pamong Praja	Kali	0	1					1	-
		Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	Dok	0	12					12	-
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Dok	2	1	1	1	100	1	1	50
		Penyediaan Data Pembakuan Rupa Bumi Unsur Buatan	Dok	0	2					2	-
	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	10	10	4	5	125	9	5	50
		Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pemuatan ILPPD	Dok	0	4					4	-
		Penyediaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Dok	0	2					2	-
		Penyusunan Laporan SPM	Dok	0	2					2	-
		Penyusunan Memori AMJ Bupati	Dok	0	0	1	1	1		1	-
		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati	Dok	0	0					0	-

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dok	28	0	14	18	128.57	14	14	50
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	28	90	14	18	128.57	14	14	50
		PESPARAWI, PESPARANI, Jamaah Haji, MTQ/STQ	Keg	0	3					3	-
		Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Beragama GMIT/KPWK	Lembaga	0	2					2	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi MUI)	Dok	0	2					2	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Organisasi/Rumah Ibadah	Dok	0	8					8	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual GMIT KPWK Jambore par	Dok	0	1					1	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual LPTQ	Dok	0	1					1	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Dok	0	0					0	-

		Spiritual BAZNAS									
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual BADAN WAKAF INDONESIA	Dok	0	0					0	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bantuan Sosial Rumah Ibadah	Dok	0	70					70	-
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dok	80							
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dok	80							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Secara umum Bagian Pemerintahan dan Kesra telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal, namun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi, untuk memperbaiki kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesra ke depannya.

Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesra, maka ditetapkan beberapa rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- 1.Indeks Reformasi Birokrasi;
- 2.Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 3.Presentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra
- 4.Presentase Layanan Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan
- 5.Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Rote Ndao untuk tahun 2024 - 2027 seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2024 - 2027

INDIKATOR	SPM/ STAND AR NASION AL	TARGET IKU	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI TAHUN		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indeks Reformasi Birokrasi		✓		71.00	71.00	71.00	71.00	71.00		71.00	71.00	
Indeks Kepuasan Masyarakat			✓	88.10	88.10	88.10	88.10	88.10		88.10	88.10	
Presentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan kesra		✓		100	100	100	100	100		100	100	
Presentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan		✓		100	100	100	100	100		100	100	
Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan		✓		100	100	100	100	100		100	100	

rakyat												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap Organisasi Perangkat Daerah harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD tersebut, adapun permasalahan yang teidentifikasi pada Bagian Pemerintahan dan Kesra antara lain :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum.
2. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
3. Belum efektifnya penyelenggaraan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan untuk membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu:
2. Proses perbandingan dilakukan agar Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan dana, program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025.
3. Dalam membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja maupun kebutuhan dana di Bapelitbang Kab. Rote Ndao

Adapun tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan
Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET		PAGU INDIKATIF
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	100	%	2,237,736,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	100	%	2,237,736,100
	Persentase Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat Daerah		100	%			Persentase Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat Daerah		100	%	
	persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100	%			persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100	%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	20,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	20,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	20,000,000
Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	(Kab. Rote Ndao,	0	Dok	-	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	(Kab. Rote Ndao,	0	Dok	-

Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lobalai, Lekunik)				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Lobalai, Lekunik)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	75,120,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	75,120,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	75,120,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	75,120,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	27,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	27,600,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	27,600,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Dok	27,600,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	100	%	281,571,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	100	%	281,571,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	24,320,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	24,320,000
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	21,000,000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	21,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	2	Pake t	40,000,000

Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	57	Lap	196,251,000	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	57	Lap	196,251,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	2	Pake t	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	2	Pake t	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	2	Pake t	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	2	Pake t	-
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	24	Lap	13,569,000	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	24	Lap	13,569,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Lap	1,989,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Lap	1,989,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Lap	11,580,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Lap	11,580,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	23	Unit	1,819,876,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	23	Unit	1,819,876,100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	10	Unit	45,966,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	10	Unit	45,966,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Unit	4,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	12	Unit	4,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	1	Unit	1,769,910,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	1	Unit	1,769,910,100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	100	%	1,962,226,500	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	100	%	1,962,226,500
	Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra		100	%			Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra		100	%	
Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	13	Dok	782,226,500	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	13	Dok	782,226,500
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	7	Dok	321,191,500	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	7	Dok	321,191,500
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua	1	Dok	60,000,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua	1	Dok	60,000,000

		kel/desa)						kel/desa)			
Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	401,035,000	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	5	Dok	401,035,000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	14	Dok	1,180,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	14	Dok	1,180,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	14	Dok	1,180,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	14	Dok	1,180,000,000
TOTAL					4,199,962,600						4,199,962,600

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak melibatkan pemangku kepentingan kelompok melalui kegiatan Musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

1. Prioritas Nasional 1: Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- b. Pengembangan skema graduasi bansos.
- c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
- e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
- f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan.
- g. Peningkatan produksi industri pengolahan.
- h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- i. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

1. Prioritas Nasional 2: SDM berkualitas

SDM Berdaya Saing dan Produktif

Arah Kebijakan:

- a. Transformasi Sosial:
 1. Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
 2. Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.
 3. Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
 4. Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
 5. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
 6. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

- b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - 7. Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).
- 2. Prioritas Nasional 3: Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

Arah Kebijakan:

 - a. Transformasi Ekonomi:
 - 8. Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi.
 - 9. Penguatan infrastruktur digital.
 - 10. Pengembangan infrastruktur transisi energi.
 - 11. Percepatan infrastruktur IKN.
 - b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - 12. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- 1. Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu adalah :

a. Tujuan

Tujuan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat yang berpedoman pada Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dari tujuan, yaitu: Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

● **Program, yaitu :**

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

● **Kegiatan, yaitu :**

8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Administrasi Tata Pemerintahan; dan
14. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

● **Sub Kegiatan, yaitu :**

14. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
17. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan;
18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
23. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Penataan Administrasi Pemerintahan;
26. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
27. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah;
28. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual.

Uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi:

- a. Jumlah program 2, jumlah kegiatan 7, jumlah sub kegiatan 15

- b. Lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebar di beberapa kawasan Kabupaten Rote Ndao.
- c. Total Anggaran Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.4,199,962,600,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan berdasarkan urusan yang ditangani Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4
Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan
Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3		4	5	6	7		8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	100	%	2,237,736,100	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	%	7,111,807,860
	Persentase Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perangkat Daerah	100	%				100	%	
	persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	%				100	%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dok	20,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	19	Dok	30,200,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	20,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Dok	20,200,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Dok	-	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7	Dok	10,000,000.00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Dok	75,120,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5	Dok	70,174,800
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	75,120,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5	Dok	70,174,800.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Dok	27,600,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Dok	27,876,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dok	27,600,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Dok	27,876,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	281,571,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	%	284,386,710
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2	Paket	24,320,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2	Paket	24,563,200.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	21,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2	Paket	21,210,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	40,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2	Paket	40,400,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	Lap	196,251,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	57	Lap	198,213,510.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Paket	-	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	Paket	5,635,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	Paket	-	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	Paket	5,635,000,000.00

Lainnya	Disediakan				semua kel/desa)				
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Lap	13,569,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	24	Lap	13,704,690
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	1,989,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Lap	2,008,890.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	11,580,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Lap	11,695,800.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23	Unit	1,819,876,100	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	23	Unit	1,050,465,660
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	45,966,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10	Unit	46,425,660.00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	12	Unit	4,000,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12	Unit	4,040,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	1	Unit	1,769,910,100	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1	Unit	1,000,000,000.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	%	1,962,226,500	(Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100	%	3,358,636,850
	Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	100	%				100	%	
Administrasi Tata	Terlaksananya Pengelolaan	13	Dok	782,226,500	(Kab. Rote Ndao,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	13	Dok	1,986,836,850

Pemerintahan	Adm. Pemerintahan				Lobalai, Lekunik)	Umum			
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7	Dok	321,191,500	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7	Dok	1,521,191,500.00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	1	Dok	60,000,000	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1	Dok	60,600,000.00
Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dok	401,035,000	(Kab. Rote Ndao, Lobalai, Lekunik)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5	Dok	405,045,350.00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14	Dok	1,180,000,000	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14	Dok	1,191,800,000
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14	Dok	1,180,000,000	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	14	Dok	1,191,800,000.00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	0	Dok	0	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	Dok	180,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0	Dok	0	(Kab. Rote Ndao, semua kecamatan, semua kel/desa)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	Dok	180,000,000.00
TOTAL				4,199,962,600					10,470,444,710

BAB V

PENUTUP

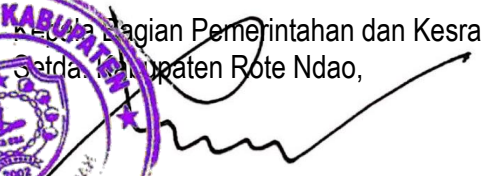
Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Bagian Pemerintahan dan Kesra sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh aparatur Bagian Pemerintahan dan Kesra secara berjenjang, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- c. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Renja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran (PPAS) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Ba'a, 12 Desember 2024

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
Setda. Kabupaten Rote Ndao,


Ronald H. Taulo, S.STP.
Pembina
NIP. 19851023 200312 1 002